



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Perang
Saudara di Libya melalui *Operation Unified Protector* oleh
NATO**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Adelia Alviani Putri Kartika

2016330123

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Perang
Saudara di Libya melalui *Operation Unified Protector* oleh
NATO**

Skripsi

Oleh

Adelia Alviani Putri Kartika

2016330123

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Adelia Alviani Putri Kartika
Nomor Pokok : 2016330123
Judul : Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Perang Saudara di Libya melalui *Operation Unified Protector* oleh NATO

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 9 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

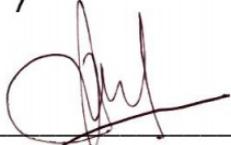
Ketua sidang merangkap anggota

I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira

: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adelia Alviani Putri Kartika

NPM : 2016330123

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Perang Saudara di Libya melalui *Operation Unified Protector* oleh NATO

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Juni 2020



Adelia Alviani Putri Kartika

2016330123

ABSTRAK

Nama : Adelia Alviani Putri Kartika

NPM : 2016330123

Judul : Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Perang Saudara di Libya melalui *Operation Unified Protector* oleh NATO

Intervensi NATO di Libya merupakan salah satu konflik yang banyak menjadi perdebatan pada tahun 2011. Pemberian kekuasaan sepenuhnya terhadap NATO kemudian memunculkan perdebatan yang mengatakan bahwa intervensi yang dilakukan dalam Perang Saudara di Libya bukanlah dilakukan atas dasar tujuan kemanusiaan namun demi memenuhi kepentingan nasional AS. Keadaan ini diperkuat dengan beberapa kegiatan NATO yang menunjukkan keterlibatannya dalam pemenuhan kepentingan nasional AS. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, **“Bagaimana Amerika Serikat mengamankan kepentingan nasionalnya melalui *Operation Unified Protector* oleh NATO dalam perang saudara di Libya?”** Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif bersama dengan studi literatur dan studi berbasis dokumen untuk pengumpulan data. Dalam bab analisis, peneliti menggunakan teori neorealisme versi John J. Mearsheimer sebagai kerangka pemikiran. Ditambah dengan beberapa konsep seperti R2P, Kepentingan nasional serta Perang Saudara. Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan NATO dalam Perang Saudara di Libya bukanlah hanya untuk tujuan kemanusiaan namun didasari dengan upaya pemenuhan kepentingan nasional AS karena dianggap mengganggu kepentingan nasional seperti minyak, kedaulatan wilayah serta sosial. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara. Hal ini didukung dengan temuan bahwa NATO meninggalkan Libya hanya dalam kurun waktu seminggu setelah Gaddafi dieksekusi masa.

Kata Kunci: NATO, Gaddafi, AS, Perang Saudara, Intervensi militer, Libya, Kepentingan Nasional, R2P.

ABSTRACT

Name : Adelia Alviani Putri Kartika

NPM : 2016330123

Title : United States National Interest in the Civil War in Libya through Operation Unified Protector by NATO

The NATO intervention in Libya was one of the most contentious conflicts in 2011. The granting of full power to NATO then led to a debate that said that the intervention carried out in the Civil War in Libya was not carried out based on humanitarian objectives but in order to fulfill US national interests. This situation is strengthened by several NATO activities that show their involvement in fulfilling US national interests. This research aims to answer the question, "**How did the United States secure its national interests through Operation Unified Protector by NATO in the civil war in Libya?**" Therefore, this research was carried out with qualitative research methods along with literature studies and document-based studies for data collection. In the analysis chapter, the researcher uses John J. Mearsheimer's version of neorealism as a framework of thinking. Coupled with several concepts such as R2P, national interests, and the Civil War. From the results of this study, researchers concluded that NATO's involvement in the Civil War in Libya was not only for humanitarian purposes but was based on efforts to fulfill US national interests because they were considered to interfere with national interests such as oil and regional and social sovereignty. This effort was carried out in various ways. This is supported by the finding that NATO left Libya only within a week after Gaddafi was executed.

Keywords: NATO, Gaddafi, US, Civil War, Military Interventions, Libya, National Interest, R2P.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah, dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Perang Saudara di Libya melalui *Operation Unified Protector* oleh NATO,” tepat pada waktunya. Penelitian ini disusun untuk memenuhi mata kuliah skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi prodi dan penelitian selanjutnya. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin diakibatkan oleh berbagai keterbatasan dalam menyusun penelitian ini. Untuk itu, segala bentuk kritik dan saran yang dapat membuat penelitian ini menjadi lebih baik akan sangat penulis hargai.

Bandung, 17 Juni 2020

Adelia Alviani Putri Kartika

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Terimakasih kepada **Allah SWT** atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis mampu menulis skripsi hingga selesai. Maaf jika hamba sering melupakan dan mengabaikanmu.
2. **Dr. Pius Sugeng Prasetyo** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. **Elisabeth A.S Dewi, Ph.D** selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional.
4. **Ratih Indraswari S.IP., M.A.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hubungan Internasional.
5. **Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.** selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih mas Nyoman atas segala bimbingan, kritik, saran serta candaan yang selalu diberikan selama proses belajar mengajar di FISIP Unpar dan juga selama masa bimbingan. Terima kasih telah mempercayakan saya sebagai anak bimbingan mas Nyoman. Terima kasih atas segala waktu yang diluangkan, saya sangat bersyukur memiliki pembimbing seperti Mas Nyoman. Maaf jika banyak kesalahan yang saya lakukan selama bimbingan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih telah membantu dari sisi materi, Teknik penulisa serta nilai-nilai hidup yang telah diberikan hingga saya mampu memberikan yang terbaik untuk skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terimakasih atas ilmu, waktu dan kesempatan yang tak henti-hentinya diberikan agar penulis

dapat menyelesaikan seluruh mata kuliah dan sampai pada mata kuliah skripsi ini.

7. Alvis Anwar, terima kasih ayah yang telah membantu, mendukung, membimbing dan percaya kakak atas apa yang kakak lakukan hingga kakak dapat masih ke UNPAR. Terima kasih atas segala motivasi, nasihat yang selalu diberikan setiap saat. Terima kasih atas segala dukungan dan kepercayaannya untuk menyelesaikan studi Hubungan Internasional. Maaf jika kakak masih banyak kekuarangan serta kesalahan. Semoga dengan selesainya studi kakak, dapat memberikan dan mengganti seluruh keringat dan tenaga yang ayah berikan untuk kakak.
8. Peggy Andiyani, terima kasih bunda atas segala dukungan moril dan materil, doa yang tidak ada henti-hentinya untuk kakak. Terima kasih sudah menjadi motivasi kakak untuk selesai kuliah dan skripsi tepat waktu. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan tanpa meminta balasan. Semoga dengan selesainya kakak, bisa melepas sebagian beban bunda dan membahagiakan bunda, mengganti seluruh doa dan keringat yang tidak pernah berhenti dikeluarkan untuk kakak.
9. Kepada seluruh keluarga, eyang, nenek, tante, om. Terimakasih banyak atas doa yang selalu diberikan dan bantuan yang diberikan ketika kalian bisa. Terimakasih banyak.
10. Vianney Anette dan Vivi Natalia, yang selalu menjadi support system saya sejak semester satu. Terima kasih sudah bersama saya sejak awal dan hingga akhir dan mewarnai hidup saya selama berkuliah di kampus 3. Terimakasih

atas motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi bersama dan tepat waktu.

11. Ayu Maghfira Nida Putri yang sudah menjadi support system sejak SMA, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya dan menjadi salah satu teman terbaik yang pernah saya kenal. Terimakasih selalu memberikan motivasi dan tempat saya untuk beristirahat.
12. Val, Aska, Ravi yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi best support system. Terimakasih selalu memberikan motivasi, canda tawa, semangat, nasihat, gossip, serta omelan-omelan yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih selalu merespon ketika saya membutuhkan semangat dan nasihat saat berada di titik bawah baik selama pengerjaan skripsi maupun diluar masa-masa skripsi. Semangat untuk kalian. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan dan dijauhkan dari rasa sedih.
13. Alice dan Geo, yang sudah menjadi teman saya sejak tahun lalu. Terimakasih sudah jadi teman saya ya? Terimakasih sudah memberikan canda tawa, nasihat dan kelakuan-kelakuan aneh kalian. That helps a lot.
14. Mentor Chevalier!! Terimakasih atas segala pelajaran, canda tawa, tangisan, beban, jobdesc, maba, bakdes, osfak yang diberikan. Kepada Richard, Kathleen, Anne, Danan dan Savitri. Terimakasih banyak. Saya sangat sangat berterimakasih pada kalian atas semuanya. Terimakasih sudah menjadi rekan kerja dan teman teman yang baik selama masa perkuliahan dan ospek. Sukses selalu ya kalian. Semoga selalu bahagia!

15. Kak Masya, Kak Dinda, Anet! Terimakasih ya. Terimakasih sudah menjadi kakak kakak yang baik, teman teman yang baik selama diluar masa pengerjaan skripsi maupun diluar pengerjaan skripsi. Terimakasih, rindu!
16. Delegasi Kuwait + Akmal, Joe, Ezra. Terimakasih atas segala perjuangan dan canda tawa dan pelajaran yang diberikan baik itu mengenai skripsi maupun diluar skripsi. Saya bersyukur dengan adanya kalian praktik diplomasi dan kehidupan perkuliahan dapat dilewati.

Ucapan terima kasih diatas ditujukan untuk semua yang memberikan andil dan semangat untuk penulis selama mengerjakan skripsi. Terima kasih pun penulis sampaikan untuk seluruh pihak terkait yang tidak ada dalam daftar diatas, mohon maaf jika ada yang terlewat dan tidak disebutkan. Percaya bahwa penulis berterima kasih dengan sangat atas kontribusinya dalam menyemangati penulis untuk menyelesaikannya secara cepat dan tepat waktu.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.2.1 Deskripsi Masalah	8
1.2.2 Pembatasan Masalah	11
1.2.3 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Kajian Pustaka	12
1.5 Kerangka Pemikiran	18
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	27
1.6.1 Metode Penelitian	27
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	27
1.7 Sistematika Pembahasan	28
BAB II	30
PECAHNYA PERANG SAUDARA DI LIBYA SERTA KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT	30
2.1 Pertentangan Kepentingan Rakyat Libya terhadap Kebijakan Politik Gaddafi	30
2.1.1 Kebijakan politik otokratis Gaddafi selama memimpin Libya	30

2.1.2	Nilai-nilai yang tidak diinginkan masyarakat Libya terhadap pemerintahan otokratis Gaddafi.	36
2.2	Aktivitas Kekerasan yang dilakukan Gaddafi selama masa pemerintahannya	38
2.2.1	Kekerasan secara langsung yang dilakukan Gaddafi terhadap masyarakat Libya	38
2.2.2	Legitimasi Gaddafi sebagai penahan gerakan pemberontak.....	43
2.2.3	Sosialisme Islam Gaddafi dalam penindasan yang terjadi di Libya	45
2.3	Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Libya	46
2.3.1	Terorisme sebagai ancaman terhadap kedaulatan Amerika Serikat.....	46
2.3.2	Naiknya harga minyak bumi sebagai salah satu pendorong keterlibatan Amerika Serikat di Perang Saudara Libya	51
2.3.3	Orientasi Penyebaran nilai-nilai Demokrasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat.	56
BAB 3	59
	NATO SEBAGAI INSTRUMEN AMERIKA SERIKAT DALAM MENEKAN LIBYA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEPENTINGAN NASIONAL MELALUI <i>OPERATION UNIFIED PROTECTOR</i>.	59
3.1	Gangguan Kepentingan Nasional Amerika Serikat ke Libya melalui NATO	60
3.1.1	Dinamika Hubungan Amerika Serikat dan Libya.....	60
3.1.2	Akibat dari Perang Saudara di Libya terhadap Amerika Serikat	64
3.2	Operation Unified Protector	70
3.2.1	<i>Responsibility to Protect</i> serta penerapannya di dalam OUP	70
3.2.2	Aktivitas OUP oleh NATO sebagai upaya menekan rezim Gaddafi.....	76
3.2.2.1	Biaya Militer yang dikeluarkan Amerika Serikat selama pelaksanaan OUP	81
3.2.2.2	Dana kemanusiaan yang dikeluarkan Amerika Serikat dalam upaya penyelesaian Perang Saudara di Libya	84
3.3	NATO Sebagai instrumen Amerika Serikat dalam Perang Saudara di Libya	86
BAB IV	93
	KESIMPULAN	93
	DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta terjadinya kekerasan di Libya pada tahun 2011	39
Gambar 2.2 Jumlah korban di bagian wilayah Libya 2011	41
Gambar 2.3 Peta yang menunjukkan angka kematian di setiap provinsi	42
Gambar 2.4 Peta yang menunjukkan daerah dengan sumber minyak terbesar ..	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data jumlah serangan yang dilakukan AS sejak April 2011 hingga Oktober 2011	80
Tabel 3.2 Total Dana yang dikeluarkan AS untuk OUP hingga 3 Juni 2011 serta estimasi dana yang akan dikeluarkan hingga bulan 30 September 2011.....	82
Tabel 3.3 Dana kemanusiaan yang dikeluarkan Amerika Serikat dalam Perang Saudara di Libya	84
Tabel 3.4 Persediaan Minyak Bumi dan Gas Alam di Libya pada tahun 1990-2010	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Arab Spring merupakan fenomena yang mengawali terjadinya pemberontakan serupa di negara-negara Arab.¹ Kejadian ini bermula di Tunisia, ketika saat itu warga Tunisia menuntut Presiden Zine El Abidin Bin Ali untuk turun dari jabatannya.² Fenomena ini kemudian memunculkan semangat bagi masyarakat yang berada di sekitar Tunisia untuk melakukan hal yang sama pada pemerintah otoriter mereka, seperti Libya, Suriah dan Mesir. Pemberontakan yang terjadi di Tunisia berhasil dalam menggulingkan presidennya dengan keadaan yang kondusif, memunculkan semangat dan harapan bagi Libya untuk mendapatkan sebuah kehidupan baru jika Gaddafi berhasil turun dari jabatan yang sudah diembannya selama puluhan tahun. Namun harapan masyarakat Libya tidak terjadi dan justru memunculkan konflik internal dalam negeri. Perebutan kekuasaan pun akhirnya terjadi dan kemudian mendorong terjadinya perang saudara yang hingga saat ini masih terjadi.³

¹ Tarik Ahmad Elseewi, "A Revolution of the Imagination", *International Journal of Communication* 5 (2011), Feature 1197–1206

² History online, "Arab Spring," 2019, <https://www.history.com/topics/middle-east/arab-spring>, Diakses pada tanggal 6 September 2019. Pukul 17.34 WIB.

³ *Ibid.*,

Presiden Gaddafi memerintah Libya selama 42 tahun dengan sistem otoriter yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat memiliki sistem demokrasi modern.⁴ Gaddafi mengklaim bahwa pemerintahannya merupakan hal yang dikehendak rakyat, namun ia tidak memberikan kesempatan pada rakyat untuk membangun partai politik dan juga melarang adanya media yang berdiri secara independen.⁵ Selain itu, selama masa pemerintahannya, Gaddafi memberlakukan sistem *'stick and carrot'* dimana para loyalis akan mendapatkan *'carrot'* sebagai hadiah sedangkan *'stick'* bagi mereka yang tidak loyal.⁶

Hal-hal ini menyebabkan munculnya keinginan masyarakat Libya untuk bebas dari pemerintahan otoriter dan merasakan kemerdekaan. Kelompok pemberontak atau para demonstran kemudian berupaya untuk menurunkan Gaddafi dari jabatannya. Tindakan kelompok ini pun memunculkan respon Gaddafi yang kemudian menggunakan tindakan kekerasan serta pelanggaran HAM dalam menekan kelompok pemberontak.⁷ Gaddafi dan pasukannya menggunakan senjata berbentuk tongkat atau senjata baton, gas air mata, serta air panas dalam penangkapan para pemberontak.⁸ Ia juga menangkap baik para demonstran maupun tokoh lain yang menuntut kebebasan di Libya seperti Mohamed Al-Sahim yang

⁴ Dr. Mesfin Gebremichael and team, Libya Conflict Insight vol.1, *Institute for Peace and Security Studies*, (Addis Ababa University:2018), Hal. 2

⁵ *Ibid.*,

⁶ Al-Ghwell, Hafed, "More stick, less carrot needed in Libya," 2015, Al-Jazeera online <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/03/stick-carrot-needed-libya-150324123436378.html>, Diakses pada tanggal 6 Februari 2020

⁷ Kafala, Tarik, "Gaddafi's Quixotic and Brutal Rule," 2011, BBC News Online, <https://www.bbc.com/news/world-africa-12532929>, Diakses pada tanggal 6 November 2020. Pukul 12.05 WIB

⁸ Human Rights Watch, "Libya: Arrests, Assaults, in Advance of Planned Protests. Halt Attacks on Peaceful Demonstrators and Free Those Arrested," 17 Februari 2011. <https://www.hrw.org/news/2011/02/16/libya-arrests-assaults-advance-planned-protests>. Diakses pada tanggal 6 November 2020. Pukul 15.55 WIB

merupakan jurnalis dalam daring mengenai kebebasan Libya.⁹ Pemberontakan ini berhasil membawa Gaddafi turun dari jabatannya namun ternyata tidak mampu membuat Libya menjadi negara yang bebas seperti apa yang diinginkan. Pemberontakan ini berlanjut dan justru memunculkan konflik baru dalam negeri karena tidak adanya satu pemerintahan yang kuat dan juga tidak adanya satu ideologi politik yang menyatukan masyarakat Libya.¹⁰

Hal ini justru memperburuk keadaan kemanusiaan, baik di Libya maupun di Tunisia. Kondisi ini mengundang empati masyarakat dunia yang kemudian diikuti oleh banyaknya negara pihak ke-3 serta organisasi yang meminta untuk segera diselesaikannya konflik di Libya seperti PBB. Berbagai usaha kemudian dilakukan oleh PBB untuk menghentikan konflik. Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu, Ban Ki Moon, meminta Gaddafi untuk menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi saat itu juga dan juga gencatan senjata.¹¹ Hal serupa juga disampaikan oleh B. Lyn Pascoe, Sekretaris Jenderal PBB urusan politik yang meminta Gaddafi untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala negara untuk melindungi masyarakat, melindungi HAM, serta dimintanya kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat termasuk kebebasan bagi media.¹² Dewan Keamanan PBB juga turut terlibat dengan meminta Gadhafi untuk melindungi warganya serta

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Dr.Mesfin Gebremichael and team, *Libya Conflict Insight vol.1*, Institute for Peace and Security Studies, (Addis Ababa University: 2018), Hal.5

¹¹ UN News, "Ban Strongly Condemns Qadhafi's Actions Against Protester, Calls for Punishments," 2011, <https://news.un.org/en/story/2011/02/367342-ban-strongly-condemns-qadhafis-actions-against-protesters-calls-punishment>, Diakses pada tanggal 6 Februari 2020

¹² UN Meetings Coverage and Press Release, "Security Council Press Statement on Libya," 2011, <https://www.un.org/press/en/2011/sc10180.doc.htm>, Diakses pada 6 Februari 2020

memintanya untuk menerima bantuan dalam bentuk medis dan obat-obatan yang akan disalurkan oleh *World Health Organization (WHO)*.¹³

Pada 17 Maret 2011, DK-PBB mengeluarkan resolusi mengenai konflik di Libya. Di dalam resolusi tersebut dikatakan bahwa DK menentang keras perbuatan Gaddafi dan rezimnya serta memberlakukan *no-fly zone* di wilayah Libya.¹⁴ Berdasarkan resolusi 1970, diberlakukan juga pembekuan dana dan semua sumber keuangan yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh otoritas Libya.¹⁵ Diberlakukan juga larangan terbang yang dimiliki, dikontrol ataupun dioperasikan oleh Libya dan diberlakukannya pelarangan penerimaan penerbangan tersebut di seluruh negara.¹⁶

Melihat tidak adanya perubahan di dalam internal Libya setelah beberapa usaha yang dilakukan serta mencegah terjadinya penyebaran konflik menuju ranah yang lebih besar, atas izin PBB yang dijelaskan dalam resolusi DK PBB 17 Maret 2011, pada 23 Maret 2011 NATO melaksanakan *Operation Unified Protector* (OUP) dengan pemimpin utama aliansi ini adalah Amerika Serikat, berdasarkan *UN Charter Chapter VII article 41*, Resolusi 1970, Resolusi 1973 yang berhubungan dengan misi yang dapat dilaksanakan oleh NATO.¹⁷ OUP juga merupakan tindakan lanjut setelah diberlakukannya *no-fly zone* di wilayah Libya. Resolusi ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban para anggota untuk melaksanakan

¹³ UN News, "Libya: UN to Use Previously Frozen Funds to Procure Medical Supplies," 2011, <https://news.un.org/en/story/2011/08/384402-libya-un-use-previously-frozen-funds-procure-medical-supplies>, Diakses pada tanggal 7 Februari 2020

¹⁴ UNSC, Resolution 1973 (2011) regarding Libyan conflict, 17 Maret 2011, Hal.3

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 5

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ NATO, *Operation Unified Protector Final Mission Stats, Fact Sheet*, 2 November 2011.

'*responsibility to protect*' dalam rangka penyelesaian konflik. Dalam resolusi ini ditekankan bahwa DK-PBB merasa sangat khawatir akan kondisi yang terjadi dan menolak segala jenis kekerasan dan penggunaan senjata terhadap masyarakat. Terkait UN *Charter*, dikatakan bahwa DK-PBB dapat memutuskan kapan penggunaan senjata akan dilakukan dalam usaha penyelesaian konflik. Dewan Keamanan juga diperbolehkan untuk meminta negara anggota untuk melakukan hal-hal terkait.¹⁸ Upaya ini kemudian dilakukan hingga diturunkannya Gaddafi secara paksa oleh masyarakat Libya pada 20 Oktober 2011.¹⁹

Pasca turunnya Gaddafi, dibentuklah pemerintahan ad-interim yaitu *National Transitional Council*. NTC memerintah selama 10 bulan sejak tahun 2011 hingga 2012 yang di bawah pimpinan Mustafa Abdul Jalil. NTC memiliki tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian serta menjaga stabilitas sosial Libya pasca turunnya Muammar Gaddafi.²⁰ Keberadaan NTC tidak semerta-merta diterima oleh masyarakat Libya. Bukan hanya dari pihak Gaddafi, namun masyarakat merasa tidak puas dengan keberadaan Jalil dan staffnya. Pada tahun 2012 di markas besar Benghazi, muncul protes yang kemudian membebani rezim Jalil.

Keberadaan NTC dapat dikatakan tidak efektif, hal ini ditunjukkan dengan jumlah korban serta banyaknya kasus pelanggaran HAM serta meninggalnya

¹⁸ UN Charter Chapter VII : *Action With Respects To Threats To The Peace, Breaches Of The Peace and Acts Of Agression, Article 41*. <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/>

¹⁹ Al Jazeera, "The Death of Gaddafi," Al Jazeera online, 2018, <https://www.aljazeera.com/programmes/the-big-picture/2018/11/death-gaddafi-181103124656506.html>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020 pukul 09.08 WIB.

²⁰ NTC, "National Transitional Council-Libya," <http://ntclibya.org> Diakses pada tanggal 3 November 2019.

sekitar 1.100 masyarakat dalam perang di Tripoli.²¹ Banyak pula masyarakat Libya yang kemudian melarikan diri ke negara tetangga seperti Tunisia untuk mendapatkan keamanan.²² NTC resmi dibubarkan pada Agustus 2012 meskipun kedaulatan pemerintahannya sudah diakui oleh PBB.²³

NATO atau *North Atlantic Treaty Organization* merupakan organisasi *collective security* yang didirikan oleh Amerika Serikat ketika perang dingin untuk menyeimbangi kekuatan Rusia, yang terdiri dari 29 negara anggota.²⁴ Mereka menyebut dirinya sebagai aliansi politik dan militer, dengan tujuan politik untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan sebagai aliansi militer ketika diplomasi tidak lagi dianggap dapat menyelesaikan masalah. NATO menggunakan konsep *power* dalam pendekatan yang teratur untuk mencapai perdamaian. Pendekatan ini dianggap pendekatan yang baru dan dianggap mampu untuk menciptakan perdamaian.²⁵ Pentingnya bekerja dalam aliansi merupakan dasar utama sehingga kekuatan akan terbentuk. Bagi NATO, beberapa permasalahan memang bisa diselesaikan dengan diplomasi, namun ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi, maka permasalahan tersebut perlu diselesaikan

²¹ Pernyataan Ghassan Salame, The Special Representative of The Secretary General and Head of the UNSMIL. SC 8588th Meeting, 29 Juli 2019 dengan tema “*The Situation in Libya.*”

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ NATO, “Member Countries.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm, Diakses pada tanggal 12 Februari 2020

²⁵ NATO, “*The Cold War, Defence and Deterrence.*” NATO, 26 Mei 2020.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm. Diakses pada 15 Februari 2020 pukul 19.08 WIB.

menggunakan cara yang lebih kuat dan bahkan dengan menggunakan instrumen militer.²⁶

NATO merupakan organisasi yang sangat menjunjung tinggi aliansi. Menyerang 1 negara aliansi NATO sama dengan menyerang seluruh anggota NATO. Hal ini sesuai dengan *article 5* yang terdapat dalam *The North Atlantic Treaty*, Washington D.C. 1949.²⁷ Hal ini sering juga disebut dengan *collective defense* dan menjadi salah satu instrumen utama dalam NATO.

Amerika Serikat merupakan negara pemimpin aliansi NATO. Bagi Amerika Serikat NATO merupakan aliansi yang membantu AS dalam melawan Uni Soviet dalam perang dingin. Ia juga merupakan negara yang banyak terlibat sejak awal mula terjadinya konflik di Libya. Sejak kemerdekaannya diakui oleh PBB pada tahun 1951, Libya menjadi negara yang mendapatkan banyak perhatian baik itu ekonomi maupun militer dari Amerika Serikat.²⁸ Hal ini menuntut keterlibatannya baik sebelum dimulainya konflik maupun dalam usaha penyelesaian konflik. Selain operasi dari NATO, *Operation Odyssey Dawn* juga dilakukan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat sipil. Namun, *Operation Odyssey Dawn* tidak berada dalam ranah NATO, namun koalisi dari beberapa negara dengan Amerika Serikat tetap menjadi pemimpinnya.

²⁶ NATO, "Crisis Management," NATO, 23 Maret 2020. https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49192.htm. Diakses pada 15 februari 2020 pukul 10.34 WIB.

²⁷ The North Atlantic Treaty, Washington D. C. 1949

²⁸ Sawani M. Youssef, *The United States and Libya; The Contradictions of Intervention and Disengagement*, University of Tripoli, (David Publishing: 2014), Hal. 784

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Libya merupakan sebuah negara di Afrika Utara yang hampir seluruh isi negaranya adalah daerah gurun. Libya berbatasan dengan Chad dan Nigeria di bagian selatan, Mesir dan Sudan di bagian timur dan tenggara, serta Tunisia dan Algeria di bagian barat. Posisi Libya yang juga menghadap ke Laut Mediterranean, yang artinya dengan menguasai Libya berarti memiliki akses terbuka pada Laut Mediterania.²⁹

Hubungan antar kedua negara, yakni Amerika Serikat dengan Libya tidaklah tergolong baru. Libya dan Amerika Serikat telah terlibat dalam beberapa kepentingan yang sama sejak sebelum Presiden Gaddafi naik menjadi Presiden menggantikan Raja Idris I. Semenjak kemerdekaannya, Raja Idris ingin tetap mempertahankan kehadiran bantuan negara asing untuk membantu meningkatkan perekonomian dan standar kehidupan masyarakat Libya.³⁰ Amerika Serikat juga merupakan salah satu pendukung dalam UN *Resolution* tahun 1949 mengenai kemerdekaan di Libya yang kemudian diakui kemerdekaannya pada tahun 1951.³¹ Adanya markas militer Amerika Serikat di Libya pun menjadikan hubungan diplomasi diantara keduanya semakin meningkat.

Hubungan antar Amerika Serikat dengan Libya semakin meningkat ketika ditemukan sumber minyak di gurun Libya pada tahun 1955 saat masa pemerintahan

²⁹ Marrella, Fabrizio and team, *Libya Before and After Gaddafi; An International Law Analysis*, Central University of Venezuela, 2012, Hal.3

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Embassy of Libya, "Libya-US Relations," <https://www.embassyoflibyadc.org/about-libya/libya-us-relations/>, Diakses pada tanggal 8 November 2020. Pukul 10.09 WIB.

Raja Idris I.³² Sumber daya minyak di Libya diperkirakan dapat bertahan hingga 60 tahun jika Libya mempertahankan jumlah produksi hariannya sebanyak 1,6 juta barel perhari.³³ Libya diperkirakan menjadi 5 negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia yang mencapai 76.7 milyar barel dan mewakili 2% jumlah minyak di dunia.³⁴ Sebagian besar hasil produksi minyak Libya di ekspor ke Amerika, menjadikan Libya sebagai sumber utama Amerika untuk bahan bakar minyak.³⁵ Hal ini kemudian berubah ketika Gaddafi naik menjadi presiden. Ia menasionalisasi minyak dengan tujuan untuk melestarikan sumber minyak yang ada di Libya.³⁶

Kedekatan Amerika Serikat dengan Libya tidak berhenti sampai di dalam bidang minyak saja. Ketika Presiden Gaddafi naik menjabat menjadi presiden, ia berkomitmen untuk melawan komunisme serta kapitalisme. Hal ini menjadi sesuai dengan Amerika Serikat yang dalam perang dingin menentang ideologi Uni Soviet mengenai komunisme dan kapitalisme. Menurut Gaddafi, kapitalisme serta komunisme merupakan pemenjaraan terhadap masyarakat, dalam bidang politik serta ekonomi.

Amerika Serikat saat pemerintahan Presiden Obama, memiliki perspektif untuk merubah pandangan dunia setelah intervensi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Hal ini ditujukan untuk merubah pandangan dunia terhadap Amerika Serikat dari yang pandangan agresif menjadi negara yang bertanggung jawab atas

³² Marrella, Fabrizio and team, *Libya Before and After Gaddafi; An International Law Analysis*, Central University of Venezuela, 2012, Hal.3

³³ Sawani M. Youssef, *The United States and Libya; The Contradictions of Intervention and Disengagement*, University of Tripoli, (David Publishing: 2014), Hal. 784

³⁴ Kjell Engelbrekt and team, *The NATO Intervention in Libya; Lesson Learned from The Campaign*, Contemporary Security Studies, (Routledge:New York, 2011), Hal.3

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Kjell Engelbrekt and team, *The NATO Intervention in Libya; Lesson Learned from The Campaign*, Contemporary Security Studies, (Routledge:New York, 2011), Hal.3

keamanan dunia.³⁷ Kebijakan luar negeri Presiden Obama di Libya sering disebut dengan kebijakan yang anti resiko serta adanya doktrin Obama, yakni “*Leading from Behind*,” dimana Presiden Obama mengajak dunia untuk turut membantu Libya keluar dari konflik yang sedang terjadi dengan bantuan dari Amerika Serikat.³⁸

Tetapi, alasan Amerika Serikat mengintervensi atas dasar kemanusiaan tampak di ragukan oleh beberapa ahli serta negara-negara yang tidak terlibat langsung dengan konflik ini. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal yang dilakukan NATO selama berada di Libya. Salah satu alasan paling kuat yang mendukung pernyataan ini adalah NATO yang menyelesaikan misinya pada 30 Oktober.³⁹ 10 hari setelah Gaddafi meninggal pada 20 Oktober 2011.⁴⁰ Serangan-serangan yang juga dilakukan NATO tidak pada tempatnya yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya memperkuat argumen bahwa AS tidaklah terlibat di Libya karena adanya pelanggaran HAM, tetapi karena alasan realisme yaitu untuk *survive* dan pemenuhan kepentingan. Hal ini kemudian menjadi sebuah masalah dan memunculkan pertanyaan bagaimanakah AS menggunakan NATO untuk membantunya memenuhi kepentingan nasional di Libya.

³⁷ *Ibid.*, Hal. 3

³⁸ Krauthammer, Charles, “The Obama doctrine: Leading from behind,” The Washington Post, 2011, https://www.washingtonpost.com/opinions/the-obama-doctrine-leading-from-behind/2011/04/28/AFBCy18E_story.html, Diakses pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 17.00 WIB.

³⁹ NATO, *Operation Unified Protector Final Mission Stats; Fact Sheet*, 2 November 2011.

⁴⁰ Al Jazeera, “The Death of Gaddafi,” Al Jazeera online, 2018, <https://www.aljazeera.com/programmes/the-big-picture/2018/11/death-gaddafi-181103124656506.html>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020 pukul 09.08 WIB.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Kajian ini akan dibatasi menggunakan 3 aspek, yaitu isu, aktor dan waktu. Isu yang akan ditekankan dalam kajian ini adalah *Operation Unified Protector* yang merupakan misi NATO selama keberadaannya di Libya. Aspek kedua adalah aktor. Dalam kajian ini, aktor akan ditekankan kepada 2 negara yang terlibat yaitu Libya dan Amerika Serikat serta organisasi keamanan NATO. Waktu yang ditekankan dalam penelitian ini adalah selama misi OUP dijalankan atau selama 7 bulan di tahun 2011 dari bulan Maret hingga Oktober.

Pada hakikatnya, keberadaan Amerika Serikat di Libya dapat dilihat dari berbagai aspek. Selain untuk membantu Libya keluar dari konflik dalam negeri, tentu saja ada kepentingan dari Amerika sendiri yang mendorong mereka untuk terlibat. Upaya Amerika Serikat dalam membantu Libya pun dapat dilihat dari berbagai hal yang dilakukan. Namun kajian ini akan berfokus mengenai bagaimana Amerika Serikat menggunakan NATO untuk mengamankan kepentingan nasionalnya dalam perang saudara di Libya.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian berupa: **“Bagaimana Amerika Serikat mengamankan kepentingan nasionalnya melalui *Operation Unified Protector* oleh NATO dalam perang saudara di Libya?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan apa saja kepentingan nasional yang dimiliki Amerika Serikat di Libya sehingga perlu melaksanakan *Operation Unified Protector* yang dijalankan oleh NATO selama 7 bulan di tahun 2011. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menggambarkan NATO sebagai kepanjangan tangan Amerika Serikat dalam memenuhi kepentingan nasionalnya dalam perang saudara di Libya. Dalam analisis, penulis akan melihat kepentingan apa saja yang terganggu oleh adanya perang saudara ini.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat seperti didapatkannya informasi baru terkait perang saudara yang terjadi di Libya serta kepentingan-kepentingan pihak lain yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini juga melatih kemampuan penulis dalam mengaplikasikan teori pada kasus ini. Sedangkan bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih lanjut di masa mendatang.

1.4 Kajian Pustaka

Untuk mengkaji topik ini penulis akan memaparkan isi dari 3 sumber yang sekiranya dapat melengkapi penelitian ini. Jurnal pertama yang akan dipaparkan adalah jurnal milik Ashley Deeks dari *University of Virginia School Law*. Jurnal ini

berjudul *The NATO Intervention in Libya, Public Law and Legal Theory Research Paper Series 2017-23*.

Jurnal ini membahas NATO yang melakukan intervensi militer di Libya ketika pecahnya perang di Libya. Dalam jurnalnya, Ashley membahas bagaimana perang ini dapat terjadi, linimasa perang serta bagaimana respon dunia terhadap konflik, terutama dari negara-negara anggota ketiga serta organisasi internasional seperti PBB. Ia juga menjelaskan bagaimana NATO dapat terlibat serta apa-apa saja yang dilakukan oleh NATO selama 7 bulan masa operasinya di Libya.

Namun, Ashley lebih menekankan terhadap legalitas yang dimiliki NATO. Ia mengatakan bahwa banyak respon dari negara-negara serta pemikir lain yang beranggapan bahwa NATO tidak bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya serta melebihi dari Resolusi 1973 yang menjadi dasar NATO melakukan intervensi militer.⁴¹ Seperti Rusia yang tidak setuju akan dilakukannya intervensi militer di Libya oleh NATO karena dianggap pada kenyataannya, NATO lebih melakukan tindakan *offensive* dan bukan melindungi masyarakat sipil seperti apa yang tertulis dalam resolusi. Menurutnya tindakan NATO tidak sesuai. Dalam argumennya, Ashley mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh NATO dengan penggunaan senjata itu sesuai dengan resolusi 1973 yang tidak melarang penggunaan senjata bagi NATO di Libya.

⁴¹ Deeks, Ashley. *The NATO Intervention in Libya, Public Law and Legal Theory Research Paper Series 2017-23*. University of Virginia School Law: 2017. p.8

Sisi baik dari jurnal ini adalah bahwa ia sangat menjelaskan keterlibatan NATO serta apakah NATO melanggar resolusi yang disepakati atau tidak. Kronologis perang di Libya juga dijelaskan secara singkat dan jelas, sehingga peneliti dapat menggunakannya sebagai acuan dalam penulisan penelitian. Hal yang terpenting yang dapat dilihat dari jurnal ini adalah sampai level mana NATO sebagai organisasi *collective security* dapat menggunakan senjatanya. Sampai batas mana legalitas NATO dalam menggunakan senjata.

Kekurangan dari jurnal ini adalah bahwa ia terlalu memihak pada NATO. Ia menjelaskan NATO dari sisi baiknya saja, dan membantah argumen-argumen yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh NATO sudah melebihi dari apa yang dijanjikan dalam resolusi 1973, dimana resolusi 1973 adalah resolusi yang dijadikan dasar oleh DK-PBB dalam memberikan mandat kepada Amerika Serikat bersama dengan NATO untuk melakukan intervensi militer di Libya.

Jurnal kedua yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah jurnal milik Ivo H. Daalder dan James G. Stavridis yang berjudul *NATO's Victory in Libya*. Jurnal ini ditulis untuk *Council of Foreign Relations*.

Dalam jurnal ini, Daalder dan Stavridis lebih menekankan kepada sistem kerja NATO selama menjalankan tugasnya di Libya. Ia juga menjelaskan betapa pentingnya aliansi bagi NATO. Pada bagian 1, ia menjelaskan sedikit mengenai latar belakang, bagaimana konflik di Libya ini dapat terjadi dan bagaimana kemudian NATO turun tangan untuk membantu Libya keluar dari konflik ini.

Disini ditunjukkan bahwa *collective security* di dalam NATO menjadi sebuah nilai utama untuk mereka dapat menyelesaikan sebuah masalah. Para negara anggota NATO memiliki keterlibatan dalam intervensi militer yang dijalankan, meskipun dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada beberapa negara yang tidak menurunkan pasukan militernya, namun tetap membantu dengan cara mendukung keputusan NATO untuk melakukan intervensi militer seperti Jerman contohnya.⁴²

Dalam upayanya menyelesaikan konflik di Libya, tidak hanya negara-negara anggota NATO saja yang terlibat. Nyatanya, banyak negara-negara Arab yang lebih memilih untuk bekerja sama dengan NATO, seperti Moroko, Yordania serta Arab. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya aliansi dalam penyelesaian konflik, agar beban dapat ditanggung secara bersama-sama dan dampak yang akan diterima pun tidak hanya menumpuk di satu negara saja.

Sisi baik dari jurnal ini untuk penelitian yang dilakukan adalah, penulis mendapatkan informasi bagaimana Amerika Serikat menggunakan organisasi aliansi militernya untuk membantu penyelesaian konflik di Libya. Jurnal ini menunjukkan bahwa tidak hanya negara yang menjadi anggota NATO saja yang kemudian menjadi aliansi dari NATO. Namun beberapa negara di luar pun turut berkontribusi untuk bekerja sama dengan NATO. Jurnal ini lebih menekankan bagaimana NATO menjalankan programnya selama di Libya, dan bukan menekankan kepada bagaimana kepentingan Amerika Serikat di Libya dan menurut

⁴² Daalder, Ivo H. dan Stavridis, James G. *NATO's Victory in Libya; The Right Way to Run an Intervention*. Foreign Affairs: 2012. p.3

penulis ini menjadi sebuah kekurangan. Terlihat dari judulnya, jurnal ini lebih memihak kepada NATO, dibandingkan pihak-pihak yang bertentangan. Daalder dan Stavridis menunjukkan kemenangan-kemenangan yang di raih oleh NATO hingga akhirnya dapat menggulingkan Gaddafi dari jabatannya.

Meskipun tidak terlalu menekankan kepentingan Amerika Serikat di dalam konflik Libya, namun jurnal ini bermanfaat karena memberikan informasi mengenai bagaimana sistem aliansi yang dimiliki NATO untuk bersama-sama menyelesaikan sebuah masalah.

Jurnal ketiga yang akan dibahas merupakan jurnal milik Youssef M. Sawani dari Universitas Tripoli. Judul dari jurnal ini adalah *The United States and Libya: The Contradictions of Intervention and Disengagement*. Fokus dari jurnal ini adalah kepentingan nasional Amerika Serikat yang memutuskan untuk bergabung dalam krisis di Libya.

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa NATO bukanlah memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat sipil. Namun, NATO merupakan perpanjangan tangan dari Amerika Serikat yang memiliki berbagai kepentingan di Libya.⁴³ NATO merupakan organisasi yang dibuat untuk melawan kekuatan Rusia yang saat itu membuat Pakta Warsawa. NATO dengan ideologi liberalnya berusaha untuk menahan ideologi komunisme yang disebarkan oleh Rusia. Ini juga menjadi salah satu kepentingan Amerika Serikat dalam melakukan intervensi militer. Amerika

⁴³ Sawani, M. Youssef. *The United States and Libya; The Contradictions of Intervention and Disengagement*. University of Tripoli: David Publishing, December 2014.

Serikat berusaha menyebarkan nilai-nilai liberalnya melalui NATO di perang Libya ketika terjadinya kondisi yang tidak stabil.

Di dalam jurnal ini juga dikatakan bahwa selain untuk menyebarkan nilai ideologi liberalnya, Libya merupakan negara yang memiliki posisi strategis. Letaknya yang berbatasan langsung dengan laut Mediteranian, serta sumber daya minyak yang melimpah menjadi poin penting tersendiri bagi Amerika Serikat. Produksi minyak Libya memenuhi 2% kebutuhan minyak dunia, sehingga dianggap menjadi posisi yang strategis. Amerika kemudian membangun pangkalan militernya untuk Libya, dengan argumen untuk membantu Libya yang saat itu baru saja merdeka. Argumen ini tampak diperkuat dengan permintaan Raja Idris I yang tidak mau mengeluarkan bantuan barat begitu saja. Produksi minyak di Libya ternyata tidak terbatas pada kepentingan Amerika Serikat saja, namun juga terhadap Eropa dan ini menjadi sebuah objektif bagi kepentingan Amerika Serikat.

Jurnal ini sangat bagus, karena banyak aspek-aspek seperti kepentingan nasional Amerika Serikat, serta doktrin Presiden Obama saat itu yaitu "*Leading from behind*," Banyak argumen dari jurnal ini yang menjadi acuan penulis dalam menulis penelitian. Adanya perubahan kebijakan luar negeri milik Amerika Serikat terhadap Libya, karena dianggap bukan menjadi kepentingan utama Amerika Serikat. Disini dijelaskan bahwa Amerika Serikat memegang peran penting dalam perminyakan di Libya.

Kekurangan dari jurnal ini adalah bahwa ia tidak terlalu membahas mengenai operasi yang dilakukan NATO pada tahun 2011. Ia berfokus pada kepentingan nasional Amerika Serikat melalui kebijakan luar negerinya serta

industri minyak di Libya yang turut menjadi kepentingan nasional Amerika. Namun, jurnal ini sangat cocok digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

Fokus dari ketiga jurnal yang dipaparkan memang sedikit berbeda-beda. Jurnal pertama yang membahas mengenai legalitas intervensi NATO, jurnal kedua yang membahas mengapa aliansi di dalam itu penting dan mengapa NATO sangat menjunjung tinggi nilai aliansi. Serta jurnal ketiga yang membahas kepentingan nasional Amerika Serikat di Libya. Meskipun berbeda, ketiga jurnal ini memiliki keterkaitan antar satu sama lain. Posisi penelitian ini adalah sebagai katalis antar 3 jurnal dan mencari kepentingan-kepentingan apa saja yang dimiliki oleh Amerika Serikat di Libya yang dijalankan melalui organisasi keamanan yang dibentuk oleh Amerika Serikat yaitu NATO.⁴⁴

1.5 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional memiliki beberapa teori besar dan sub-teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena HI yang terjadi. Kajian ini akan menggunakan teori *offensive realism* untuk menjelaskan permasalahan mengenai kepentingan Amerika di Libya. Penekanan kepentingan nasional kajian ini akan di tetapkan pada kepentingan nasional menurut K.J. Holsti. Bagi para pemikir realisme, negara merupakan satu-satunya aktor yang ada dalam Hubungan Internasional. Negara sebagai aktor utama memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan, dan menentukan kebijakan lain yang berkaitan dengan kelangsungan negaranya. Untuk dapat melakukan itu, negara harus memiliki *power*.

⁴⁴ Ibid.,

Pun seperti beberapa tokoh realisme lainnya seperti Thucydides, Nicholo Machiavelli, Thomas Hobbes yang juga menganggap pentingnya *power* bagi kehidupan dan keberlangsungan negara tersebut. Selama bertahun-tahun sejak dikenalkannya teori realisme oleh Morgenthau, teori realisme kini telah berkembang menjadi teori yang terbagi menjadi beberapa cabang seperti neorealisme yang berkembang lagi *offensive realism* dan *defensive realism*. Kajian ini akan menggunakan *offensive realism* sebagai acuan. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam *offensive realism* adalah J.J. Mearsheimer, dimana ia mengutarakan banyak asumsi mengenai negara dalam sistem internasional menurut pandangan *offensive realism* di dalam buku yang berjudul *The Tragedy of Great Power Politics*. Buku ini pula yang akan menjadi acuan penulis.

Mearsheimer memulai bukunya dengan mengatakan bahwa status quo merupakan kondisi yang sesungguhnya tidak ada. Hal ini dikarenakan semua negara akan berlomba-lomba untuk menjadi hegemoni atau satu-satunya kekuatan yang ada. Menurut Mearsheimer ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keinginan negara untuk menjadi hegemoni. Faktor pertama yang mempengaruhi gerakan setiap negara adalah tidak adanya pemerintah diatas pemerintah atau lembaga yang dapat menjamin keamanan sebuah negara. Faktor kedua adalah setiap negara memiliki kemampuan militer yang dapat digunakan untuk mengancam kedaulatan negara lain. Faktor yang terakhir adalah karena tidak ada satu pun negara yang dapat mengetahui tujuan atau intensi dari negara lain.⁴⁵

⁴⁵ J.J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (New York; W.W. Norton & Co, 2001), Hal. 3

Karena beberapa faktor inilah negara merasa ketakutan antar satu sama lain, terutama negara-negara besar. Untuk mengurangi rasa ketakutan tersebut, negara meningkatkan kekuatan yang dimilikinya. Dengan semakin besar kekuatan, semakin besar pula peluang mereka untuk bertahan hidup. Maka dari itu, tujuan utama setiap negara adalah menjadi hegemon.⁴⁶ Jika mereka menjadi hegemon, secara otomatis mereka akan menjadi kekuatan tunggal di dalam sistem. Mereka akan meningkatkan kekuatan yang dimiliki meskipun hal tersebut dapat mengancam kedaulatan negara lain. Mearsheimer mengatakan bahwa “*the best defense is a good offense.*”⁴⁷ Dalam kalimat ini terlihat bagaimana setiap negara memiliki keinginan untuk menyerang negara lain demi menjaga keselamatan negaranya. Kekuatan yang dimiliki atau berusaha dimiliki setiap negara bersifat *limitless* atau tidak ada batasan mengenai seberapa banyak mereka harus memilikinya. Setiap negara berhak memiliki sebanyak mungkin kekuatan demi menjamin keberlangsungan hidup mereka sendiri. Berbeda dengan *defensive realism* yang cenderung “*preserving power,*” *offensive realism* cenderung memilih untuk “*increasing power,*” untuk bertahan hidup.

Negara-negara tersebut sesungguhnya tidak memiliki alasan untuk berperang antar satu sama lain. Hal ini dilakukan demi meyakinkan keselamatan mereka dari ancaman negara lain yang dapat saja sewaktu-waktu diluncurkan dan mengancam kedaulatan mereka. Hal ini sering terjadi pada negara-negara besar yang memiliki sumber daya yang besar terutama dalam bidang militer.

⁴⁶ *Ibid.*, Hal.2

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 36

Namun kondisi ini akan menciptakan kondisi lain yaitu “*Security Dilemma*.” Kondisi ini merupakan logika dasar bagi *offensive realism*.⁴⁸ *Security Dilemma* akan terjadi karena tidak tahunya negara akan intensi dari negara lain yang kemudian negara tersebut akan meningkatkan kekuatannya untuk menjamin keselamatannya. Namun sulit bagi suatu negara untuk meningkatkan kekuatan tanpa harus mengancam keselamatan dari negara lain. Dalam hal ini, Mearsheimer berargumen bahwa negara harus bersikap *offensive* antar sesamanya. Keamanan dan kekuatan merupakan hal yang paling utama bagi *offensive realism*. Kepentingan non-keamanan seperti ideologi dapat diraih ketika mereka sedang tidak terlibat dalam konflik atau persaingan keamanan.⁴⁹

Kenneth Waltz juga mengatakan bahwa keberlangsungan suatu negara akan berlangsung pada kemampuan militer suatu negara dan hubungannya dengan negara lain.⁵⁰ Hal ini jelas menunjukkan bahwa ia juga berpendapat bahwa *power* merupakan instrumen utama dalam hubungan internasional. Memang diperlukan adanya aliansi dengan negara lain, namun negara harus tetap memiliki *power* agar kepentingan nasional mereka dapat terpenuhi.

Kajian ini juga menggunakan pendekatan baru yang pada masanya diusulkan oleh Kanada, yaitu *Responsibility to Protect*. Upaya penyelesaian konflik di Libya yang dilakukan oleh Amerika beserta aliansinya melalui organisasi aliansi yaitu NATO, merupakan salah satu upaya dalam penerapan ide *Responsibility to*

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 35

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 46

⁵⁰ Waltz, Kenneth Neal, *Theory of International Politics*. (New York: McGraw Hill), Hal. 103-104

Protect atau yang biasa di sebut dengan R2P. R2P merupakan komitmen politik yang mencegah terjadinya kejahatan kemanusiaan.⁵¹

Di dalam R2P *Report* yang dibuat oleh *International Commission on Intervention and State Sovereignty*, prinsip dasar dari dilakukannya R2P ini adalah ketika suatu negara tidak mampu atau tidak lagi memiliki keinginan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, maka kewajiban untuk menyelesaikan konflik tersebut menjadi sebuah tanggung jawab internasional.⁵² Dalam R2P juga disebutkan dengan adanya intervensi militer. Prinsip utama dari dilakukannya intervensi militer adalah pertama, ketika sudah terdapat korban dalam jumlah yang sangat besar, baik itu dalam aksi genosida ataupun tidak.⁵³ Kedua, ketika sudah terjadinya pembersihan etnis, baik itu dalam bentuk pembunuhan, pengusiran atau segala kegiatan yang melanggar hak asasi manusia. R2P juga hanya boleh dilakukan ketika tujuan dari negara yang melakukan intervensi militer merupakan tujuan yang baik dan atas nama kemanusiaan. Tujuan baik dari negara dapat dilihat dan diputuskan ketika hal itu mendapat persetujuan dari wilayah negara regional serta kecemasan dari para korban. Intervensi militer juga hanya bisa dilakukan, ketika itu menjadi pilihan terakhir dan upaya penyelesaian konflik seperti diplomasi tidak dapat berjalan dengan baik. Prinsip yang ke tiga, intervensi militer harus dilakukan dalam upaya seminimal mungkin, mengingat adanya masyarakat sipil

⁵¹ United Nations Office on Genocide Prevention and The Responsibility to Protect, "Responsibility to Protect," UN Nations, <https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml>. Diakses pada 23 mei 2020.

⁵² Report of The International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect*, (Ottawa, Canada: International Development Research Centre, 2001), Hal. XI

⁵³ *Ibid.*, Hal. 12

yang kemungkinan juga menjadi korban. Serta prinsip terakhir adalah harus adanya kemungkinan keberhasilan dari pelaksanaan intervensi militer ini. Intervensi militer harus bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan bukan untuk memperburuk keadaan.

Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang akan ditekankan dalam penelitian ini. Bagi Amerika Serikat, kepentingan nasional paling utama adalah terciptanya keamanan nasional, kemakmuran ekonomi, melindungi warga Amerika Serikat dan perbatasan Amerika Serikat, terjadinya penegakan hukum, serta terciptanya lingkungan dan populasi yang sehat.⁵⁴ Kepentingan nasional akan berpengaruh bagaimana kebijakan luar negeri tersebut di bentuk.

Penelitian ini akan menggunakan konsep kepentingan nasional yang dikatakan oleh K.J. Holsti. Melihat luasnya kemungkinan kepentingan nasional yang ada di era ini, Holsti membagi kepentingan tersebut berdasarkan: (1.) Nilai yang tertera di dalam kepentingan tersebut; (2.) Waktu yang ditentukan untuk mencapai kepentingan tersebut; serta (3.) Jenis tuntutan yang ditujukan kepada negara lain dalam upaya pencapaian, dan ditentukanlah 3 jenis kepentingan nasional yaitu *Core Interests and Values*, *Middle Range goals* serta *Long Range Goals*.⁵⁵

Core Interests and Values merupakan kepentingan yang lekat dengan kepentingan yang sering berhubungan dengan kelestarian negara tersebut, biasanya

⁵⁴ "United States Foreign Policy and Government Guide", *Volume 1 Important Information and Developments*, (International Business Publication: USA, 2011)

⁵⁵ K.J. Holsti, *International Politics; A Framework for Analysis Third Edition*, (Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs: New Jersey. 1977), Hal.144

tertulis di dalam prinsip-prinsip dasar di dalam kebijakan luar negeri. Setiap negara dapat memiliki *core-interest* yang berbeda, tergantung pada pemerintah ataupun pihak pembuat kebijakan. Namun, di era seperti sekarang ini, *core-interest* sering kali dikaitkan dengan kedaulatan serta kebebasan teritorial. *Core-interest* dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung dengan situasi apa yang saat itu terjadi.

Ada 3 tipe kepentingan di dalam *Middle Range Goals*: (1) Tipe kepentingan ekonomi, (2) Martabat negara di mata internasional; dan (3) Imperialisme. *Middle Range Goals* ini tidak terbatas akan waktu tertentu namun ditetapkan dengan tingkat ekonomi. Yang terakhir adalah *Long-Range Goals*, dimana kepentingan ini berfokus pada ideologi utama negara tersebut yang kemudian mengatur bagaimana hubungan negara tersebut di dalam sistem internasional.

Dalam upaya pencapaian kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat telah melakukan berbagai hal baik itu dalam lingkup regional maupun internasional, baik itu melalui diplomasi maupun melalui bidang militer dan senjata. Upaya ini dilakukan karena beberapa konflik dianggap telah mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat. Terkadang, Amerika Serikat juga menggabungkan diplomasi dengan kekuatan militer untuk menahan suatu konflik untuk tidak berkembang dan mengancam keamanan nasional. Kepentingan nasional ini akan dibahas lebih mendalam di dalam bab 2.

Penelitian ini juga akan menekankan pada konsep Perang. Clausewitz mendefinisikan perang sebagai sebuah tindakan sosial yang berisi dan diidentifikasi dengan kekerasan yang memiliki tujuan untuk memaksakan

kehendak pihak tertentu terhadap lawan.⁵⁶ Clausewitz melihat perang sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perasaan dan moral manusia, serta telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Hal ini dikatakan Clausewitz dengan adanya *hostile feelings* dan *hostile intentions*, dimana perasaan benci akan selalu berhubungan dengan niat akan kebencian itu sendiri ketika bahkan mungkin niat bermusuhan telah ada tanpa disertai sebuah peristiwa tertentu yang membawa kebencian tersebut.⁵⁷

Dalam pembahasan di BAB II, penulis akan menggunakan konsep kekerasan yang ditulis oleh Johan Galtung. Bagi Johan Galtung, kekerasan terjadi ketika adanya jarak antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi.⁵⁸ Ia melihat kekerasan merupakan sesuatu yang seharusnya dapat dihindari dan tidak terjadi terlebih terhadap kebutuhan dasar manusia, menurunkan tingkat apa yang sebenarnya terjadi dibawah apa yang seharusnya terjadi. Galtung membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 4 bagian: (1) *survival needs*, (2) *well-being needs*, (3) *meaning needs*, serta (4) *freedom needs*.

Jika kebutuhan-kebutuhan dasar diatas tidak terpenuhi, maka disitulah kekerasan terjadi. Galtung membagi kekerasan menjadi 3 jenis, yaitu, (1) *direct violence*, (2) *structural violence*, dan (3) *cultural violence*. *Direct violence* terjadi ketika adanya ancaman bagi kehidupan seperti pembunuhan dan pemusnahan massal. Galtung mengambil perang sebagai contoh dari *direct violence* karena

⁵⁶ Clausewitz, Carl von, *On War on War*, ed. Michael Howard and Peter Paret, (United Kingdom: Princeton University Press, 1976), Hal. 167

⁵⁷ *Ibid.*, Hal. 170

⁵⁸ Johan Galtung, "Violence, Peace and Peace Research," *Journal of Peace Research*, Vol.6, No.3 (1969), Hal.168

adanya proses penghilangan nyawa di dalamnya. *Structural violence* dijelaskan Galtung sebagai adanya ketidakadilan sosial, adanya fasilitas yang terbagi secara tidak merata dan adanya satu kekuatan diatas yang lain yang memutuskan pembagian fasilitas tersebut. Ia memberi contoh seperti jika suatu kelompok mengalami kelaparan dimana seharusnya kelaparan tersebut tidak terjadi, maka itulah yang disebut kekerasan.⁵⁹ Hal ini juga diperkuat dengan adanya kritik Marxis terhadap masyarakat kapitalis yang memutuskan bahwa keuntungan dari biaya produksi merupakan hak dari pemilik yang dapat membawanya kedalam kelas-kelas yang tinggi.⁶⁰ Kekerasan terakhir menurut Galtung adalah *cultural violence*. *Cultural violence* terjadi ketika aspek-aspek kehidupan seperti agama, ideologi, bahasa, seni serta ilmu pengetahuan dijadikan sebagai alasan untuk menormalisasi atau membuat kekerasan terlihat sebagai kegiatan yang wajar.⁶¹ Galtung juga membagi kekerasan menjadi 2, apakah dalam bentuk laten atau manifes⁶² Kekerasan manifes merupakan kekerasan yang terlihat, dapat di observasi baik itu kekerasan langsung, struktural maupun kultural. Sedangkan kekerasan laten adalah kekerasan yang muncul ketika situasi yang ada berada pada kondisi yang tidak stabil. Kekerasan yang terjadi belum ada namun memiliki potensi untuk terjadi.

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*, Hal.171

⁶¹ Johan Galtung, "Cultural Violence," *Journal of Peace Research*, vol.27, no.3, 1990, Hal. 291

⁶² Johan Galtung, "Violence, Peace and Peace Research," *Journal of Peace Research*, Vol.6, No.3 (1969), Hal.172

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Menurut Cresswell, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan dalam penjelasan menggunakan narasi dalam menjelaskan tahap serta hasil penelitian yang dilakukan. Teknik wawancara, studi kasus serta studi pustaka merupakan metode-metode yang sering digunakan dalam mengumpulkan data penelitian.⁶³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode narasi serta studi pustaka dalam menjelaskan studi kasus: Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Perang Saudara Libya melalui NATO. Studi pustaka dilakukan karena sumber-sumber data yang didapatkan untuk menjelaskan kasus ini adalah melalui buku, jurnal, artikel, serta dokumen resmi kenegaraan yang di rilis oleh masing-masing negara. Banyaknya faktor historis dalam studi kasus yang juga didapatkan melalui sumber-sumber tersebut akan lebih memudahkan penulisan serta pemahaman jika dituliskan dalam bentuk narasi. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian akan didapatkan melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen resmi negara, artikel maupun pernyataan resmi dari tokoh kenegaraan. Dokumen resmi yang dimaksud adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh baik itu pemerintah Amerika Serikat maupun

⁶³ John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Los Angeles: SAGE Publications, 2009)

oleh NATO. Selain itu, data juga bisa didapatkan dari hasil-hasil sidang yang dilakukan oleh PBB dan badan-badan dibawahnya seperti DK-PBB. Data yang didapatkan merupakan data yang ada dalam bentuk data sekunder.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab 1 berisi **Pendahuluan** yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah (Deskripsi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab 2 akan membahas lebih dalam mengenai **Perang Saudara di Libya pada tahun 2011 serta Kepentingan Nasional Amerika Serikat**. Bab ini akan lebih menekankan kepada bagaimana terjadinya perang saudara tersebut, nilai-nilai pertentangan apa yang terjadi antara Gaddafi serta masyarakat Libya, kekerasan apa yang terjadi serta Kepentingan Nasional apa saja yang dimiliki Amerika Serikat di Libya.

Bab 3 akan berisikan mengenai **NATO sebagai instrumen Amerika Serikat dalam menekan Libya sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional melalui Operation Unified Protector**.

Bab 4 berisikan **Kesimpulan dan Saran** terkait **penelitian penulis**.

